

PENDAMPINGAN PEMERINTAH DESA MOJOMALANG DALAM MENGELOLA DATA-DATA LAYANAN DESA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN DESA MANDIRI DATA

Dida Rahmadanik

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
surel: didarahma@untag-sby.ac.id

Yusuf Hariyoko

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
surel: yusufhari@untag-sby.ac.id

Maylia Goswira Witri

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
surel: mayliagoswira21@gmail.com

Bagus Fatkul Alam

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
surel: bagusfatkhul1205@gmail.com

Abstrak

Masa pandemi menjadikan berbagai proses pelayanan pemerintahan desa harus dilakukan dengan mengurangi proses interaksi langsung. Efektifitas menjadi pertanyaan akan kualitas yang dihasilkan dari proses tersebut. Secara langsung akan munculkan *gap* antara kualitas yang diberikan sekarang dengan yang sebelum masa pandemi. Inovasi dapat dimunculkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan lingkungan yang sudah terbentuk dengan adanya teknologi tersebut. Dalam usaha untuk mewujudkan hal tersebut, kami berusaha untuk memberikan fasilitas berupa pelatihan kepada pemerintah desa Mojomalang, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban untuk melakukan adaptasi teknologi. Pelatihan dan pendampingan berupa pelayanan surat yang menggunakan aplikasi yang tersedia di *google form* secara gratis. Proses pelatihan ini kita berikan kepada perangkat desa dan kemudian akan disosialisasikan kepada masyarakat. *google form* akan menghasilkan link isian yang dapat diisi oleh masyarakat sesuai dengan layanan kebutuhan suratnya. Selain memberikan pelayanan, format kerja seperti itu akan memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menyimpan dokumen. Secara sistematis, dokumen yang sudah diajukan oleh warga akan tersimpan dalam data base pemerintah desa. Data tersebut ke depannya bisa dianalisis sehingga akan mendapatkan inovasi pelayanan surat yang diperlukan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: Pengelolaan data, pelayanan desa, mandiri data

Pendahuluan

Eksistensi desa dengan adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa sangat krusial. Peraturan tersebut memberikan wewenang yang luas bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Masalah-masalah lain muncul saat desa tersebut tidak mampu menjalankan manajemen yang handal dan bagus dalam mengatur desanya.

Manajemen tersebut harus didukung dengan data yang mumpuni dan berkualitas. Data menjadi instrument penting yang mampu menggambarkan kondisi yang dihadapi. Pendekatan SIM menurut (Davis, 1992) “sebagai sebuah proses terdiri dari input, proses, output, dan didukung oleh penyimpanan”. Data yang diolah menjadi informasi kemudian akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pemimpin. Hal ini seperti yang digambarkan oleh gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses kerja Sistem Informasi

Sumber: olahan peneliti

Kabupaten Tuban salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berada di wilayah paling Barat dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan, salah satu kecamatan di Tuban adalah Kecamatan Parengan. Kabupaten Tuban memiliki beberapa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Desa Mojomalang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Tuban. Desa ini secara keseluruhan masih belum memanfaatkan data secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya bantuan yang belum tepat sasaran. Selain itu, masih ada juga masalah lain yang belum pas terkait dengan perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Sehingga, perlu adanya kesadaran untuk membangun sistem data yang baik dan bermanfaat.

Permasalahan Mitra

Pemerintah Desa Mojomalang sudah memiliki beberapa kegiatan terkait dengan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dan membutuhkan manajemen yang lebih intens, mulai dari cara penyimpanan, sampai dengan pemanfaatannya. Dari narasi tersebut permasalahan yang dihadapi oleh desa mitra, diantaranya:

1. Penyaluran bantuan yang harusnya sampai pada pihak yang lebih membutuhkan
2. Pengambilan keputusan yang masih belum berbasis pada data yang komprehensif
3. Kebutuhan untuk menciptakan perencanaan jangka panjang yang berkualitas

Metode

Berdasarkan permasalahan dan solusi yang di uraikan oleh pengusul program maka metode pelaksanaan yang akan di laksanakan adalah identifikasi permasalahan meliputi survei awal di lapangan, kemudian di lanjutan wawancara dengan perangkat desa, observasi dan memilah permasalahan mana yang di anggap paling penting. Setelah mengidentifikasi masalah maka pegusul program akan melakukan pendampingan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa.

Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat yang diusulkan akan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 2 (dua) orang yang dan memiliki latar belakang ilmu administrasi publik dengan bidang kajian yang berbeda, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Selain itu pengabdian melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa yang memiliki bidang ilmu dari Program Studi Administrasi. Ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan ini memiliki beberapa pengalaman dalam melakukan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan ekonomi di beberapa Desa di Jawa Timur. Sedangkan susunan tim pelaksana dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Susunan Tim Pelaksana Program Kemitraan Masyarakat Tahun 2020

No	Nama dan Jabatan dalam Tim Pengabdian	Bidang Keahlian	Supporting dalam pelaksanaan
1	Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP	Manajemen Publik	Pendampingan Manajemen dalam pengolahan data
2	Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP	Kebijakan Publik	Manajemen basis data

Hasil Dan Pembahasan

Program Desa Mandiri Data adalah suatu program yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengolah data-data yang ada di dalam pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Di Indonesia sendiri, Pemanfaatan IT untuk mengurus urusan pemerintahan terbilang masih kurang dimanfaatkan dengan baik, terlebih lagi dalam pemerintahan daerah lini terkecil yaitu desa, padahal untuk menjadikan negara maju dan canggih semua kegiatan masyarakatnya harus sudah berbasis teknologi, baik kegiatan di bidang ekonomi, politik, kesehatan maupun pendidikan.

Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien, juga dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis.

Penguasaan teknologi dan informasi menjadi sesuatu yang mutlak harus dikuasai penuh oleh masyarakat. Apalagi dalam bidang politik yang menyangkut pengelolaan pemerintahan, baik dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Apalagi di masa sekarang dengan mobilitas masyarakat yang tinggi pemerintah juga semakin dituntut untuk mengarah ke pelayanan berbasis digital. Ketersediaan informasi oleh pemerintah pada kenyataannya masih belum sesuai harapan masyarakat. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa persentase masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengakses informasi publik seperti administrasi.

Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik), Indonesia memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 83.813 dalam kata lain kegiatan administrasi pemerintahan banyak dilakukan di desa. Sehingga aparat pemerintahan di tingkat desa dituntut untuk menguasai teknologi dan informasi supaya dapat memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada masyarakatnya.

Dalam kesempatan ini kami melakukan pendampingan masyarakat untuk menciptakan Desa Mandiri Data yang mana program ini berupa pelatihan yang kami khususkan untuk aparatur desa yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bertempat di Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur kami mengajak sejumlah Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengikuti diskusi Pengelolaan Data berbasis Elektronik atau disebut dengan E-Services. Diskusi dilaksanakan pada hari Rabu, 02 Septemeber 2020 di Balai Desa Mojomalang.

Kami terdiri dari 4 anggota tim yakni 2 orang Dosen Administrasi Negara dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan 2 orang Mahasiswa Administrasi Negara dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Acara diskusi dibuka oleh Kepala Desa Mojomalang Bapak Joko Sujadi, kemudian penyerahan acara diskusi kepada ketua tim pendampingan masyarakat yakni Ibu Dida Rahmadanik S.AP,M.AP, dilanjutkan pada bagian inti yakni diskusi dan tanya jawab, dipimpin oleh Bapak Yusuf Hariyoko, S.AP,M.AP selaku pemateri, di temani oleh 2 orang mahasiswanya yakni Maylia Goswira Witri dan Bagus Fatkhul Alam.

Kepala desa Mojomalang Bapak Joko Sujadi menyampaikan, bahwa diskusi mengenai perkembangan komunikasi dan informasi merupakan suatu hal yang harus diberikan kepada para aparatur desa secara berkesinambungan, agar masyarakat dapat mengetahui apa saja manfaat menggunakan IT, dan bagaimana cara memanfaatkannya sehingga diharapkan agar masyarakat Desa Mojomalang dapat mengikuti perkembangan jaman yang kian pesat. Apalagi di Indonesia teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu dari enam bidang fokus utama pengembangan IPTEK, selain bidang ketahanan pangan, sumber energi terbarukan, teknologi dan manajemen transportasi, teknologi pertahanan dan teknologi kesehatan obat-obatan.

Sementara itu, Bapak Gunawan selaku Sekertaris Desa juga menambahkan, bahwa pelatihan ini merupakan salah satu wujud pembinaan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa yang berbasis IT. Tujuannya meningkatkan pengetahuan aparat desa dan BPD serta tokoh-tokoh pemuda Desa Mojomalang dalam mengelola manajemen, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam menyajikan informasi dan data yang benar menggunakan media teknologi. Pak Gunawan juga memperjelas bahwa sasaran yang diinginkan untuk pelatihan Program Mandiri Data ini adalah Perangkat Desa, Para Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Mojomalang, pengenalan dan penggunaan perangkat IT serta pengoperasian beberapa aplikasi dasar harus terus dilatih dan diajarkan. Supaya dapat mewujudkan Desa Mojomalang yang maju dan sejahtera.

Dalam program pendampingan masyarakat demi mewujudkan Desa Mojomalang menjadi desa dengan mandiri data, kami menawarkan sebuah program kepada aparatur desa untuk memberikan pelayanan publik berbasis elektronik dengan memanfaatkan fitur bawaan dari Google yaitu Google formulir. Semua kegiatan administrasi yang tadinya dilakukan secara konvensional atau manual akan berganti menjadi lebih modern, cepat dan canggih. Masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk pembuatan surat pengantar dari desa atau surat keterangan dari desa, tidak perlu repot mengantri panjang dan menunggu lama untuk mengisi syarat pembuatan surat, dengan sistem pengisian formulir digital masyarakat dapat mengisi kelengkapan data sebagai syarat pembuatan surat dengan sangat cepat. Bahkan jika masyarakat memiliki kendala untuk datang ke kantor desa, pengisian kelengkapan data bisa dilakukan dirumah atau dimanapun saja dengan menggunakan ponsel pribadi. Masyarakat harus meminta link formulir digital terlebih dahulu dari aparat desa, lalu setelahnya dapat mengisi kelengkapan data dalam pelayanan yang dibutuhkan. Tentu saja hal ini dinilai sangat efektif dan efisien. Mengingat penginputan data yang dilakukan secara digital akan jauh lebih aman, praktis dan cepat.

Namun tetap saja dalam pelaksanaan program Mandiri Data yang kami tawarkan menjumpai berbagai macam kendala baik secara internal maupun eksternal. Bapak Joko

Sujadi, Kepala Desa Mojomalang menjelaskan kendala-kendala yang terjadi di dalam administrasi pemerintahan desa dalam sesi diskusi. Pertama, sebagian besar Aparat Desa Mojomalang tidak dapat mengoperasikan teknologi internet dengan baik. Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi yang minim membuat mereka gaptek akan teknologi. Bahkan Joko menyebutkan sampai sekarang masih ada kaur di desa yang menangani pelaporan belum paham IT, munculnya hal tersebut tidak lepas dari kondisi kaur yang sudah berumur. Hal tersebut dibuat semakin rumit dengan besarnya dana yang harus dikelola. Kedua, Rendahnya pendidikan Aparat Desa Mojomalang, Aparat desa Mojomalang banyak yang menamatkan pendidikannya hanya pada tingkat SD,SMP dan SMA saja, hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Rendahnya pendidikan juga menjadi akar permasalahan yakni kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam yang ada pemerintahan, masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam penerapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan. Ketiga, ketersediaan alat untuk menunjang terwujudnya desa mandiri data masih sangat terbatas. Desa Mojomalang bisa dikatakan desa yang cukup tertinggal karena sarana dan prasana dalam kegiatan administrasi desa masih sangat minim sekali. Keempat, Jaringan internet yang tidak bisa stabil. Tentu saja kendala-kendala tersebut akan menghambat proses pelaksanaan progam desa mandiri data, oleh sebab itu Joko Sujadi meminta solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam administrasi pemerintahan desa terlebih dahulu.

Dari berbagai kendala yang dijelaskan oleh Kepala Desa Mojomalang kami memberikan beberapa solusi diantaranya: Pertama, Penguasaan IPTEK memanglah memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. SDM merupakan aset bangsa dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas Sumber Daya Manusiannya oleh karena untuk membentuk Aparatur Desa yang mumpuni dalam menggunakan teknologi, kami akan memberikan pelatihan secara intensif, pelatihan ini akan dilakukan secara berkala setiap minggunya. Karena kondisi yang belum stabil karena pandemi COVID-19 kami akan melakukan pelatihan menggunakan video virtual, hal ini juga akan melatih para aparatur untuk membiasakan diri menggunakan teknologi dalam informasi dan komunikasi. Kedua, sebagai pemerintahan terendah, desa mengurus hampir seluruh kebutuhan masyarakat mulai dari kelahiran hingga kematian. Tidak hanya di tingkat desa, persoalan Sumber Daya Manusia juga terjadi di kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat. Kapasitas sumber daya manusia, kompetensi pembina pemerintahan, dan pembangunan desa juga bervariasi. Beragam persoalan itu akan berpengaruh langsung kepada kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika riwayat pendidikan yang dimiliki aparat desa mempengaruhi kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan maka solusi untuk melakukan pengembangan SDM yaitu mengadakan bimbingan dan pelatihan. Pun dalam merekrut aparatur desa sebaiknya dilakukan uji kompetensi terlebih dahulu. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasana dalam mewujudkan desa mandiri data, anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagian dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasana yang kurang.

Perangkat yang dipilih dalam pengabdian pendampingan di Desa Mojomalang ini adalah *G form* atau *Goole form* dengan menyadari pola kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dengan dunia digital dan melihat kondisi dimana hampir semua orang memiliki ponsel

android maka hal yang paling mudah dan efisien untuk memberikan pelayanan adalah lewat ponsel yang selalu digenggam oleh masyarakat. Nantinya warga Desa Mojomalang tidak perlu berbondong – bondong membawa surat perengkapan yang sangat banyak ke balai atau kantor desa untuk mengurus surat – surat atau jenis data kependudukan yang lainnya. Warga Desa Mojomalang cukup dirumah dan memanfaatkan ponsel genggam mereka saja. Untuk penyaluran link Google formulir terdapat dua cara yaitu :

1. Memanfaatkan group *Whatsapp* RT setempat, dimana setiap RT memiliki group *whatsapp* pribadi dan salah satu anggota keluarga dai setiap KK diharapkan dapat bergabung di group tersebut.
2. Memaparkan kode QR atau barkot Google formulir pada madding atau majalah dinding desa Mojomalang.

Jenis- jenis pelayanan yang tedapat di aplikasi Google formulir :

- Surat pengantar pembuatan KTP / E-KTP.
- Kartu Keluarga :
 - KK Baru
 - Penambahan Anggota Keluarga Baru Karena Kelahiran
 - Penambahan Anggota Keluarga Baru Karena Menumpang KK
 - Pengurangan Anggota Keluarga
 - KK Hilang/ Rusak
- Akte Kelahiran
- Akte Kematian :
 - Surat Keterangan Kematian (SALINAN)
 - Surat Kematian:
- Pengajuan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- Pembuatan SKU (Surat Keterangan Usaha)
- Surat Penghasilan Orang Tua (Surat keterangan penghasilan orang tua biasanya dipergunakan sebagai kelengkapan berkas beasiswa)
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- Perpindahan Penduduk
- Keterangan Janda / Duda
- Surat Keterangan Domisili Penduduk
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Surat Keterangan Domisili Instansi/ Lembaga
- Surat Keterangan Bepergian
- Surat Keterangan Pindah RT/RW Dalam Kelurahan
- Surat Keterangan Keluar Kewarganegaraan
- Kehilnagan Dokumen

➤ Izin Cerai

Setelah warga memilih dan mengikuti prosedur pengisian lalu warga dapat mengambil surat yang mereka urus di kantor atau balai desa Mojomalang.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan dan pelatihan yang sudah dan sedang berjalan saat ini merupakan kegiatan awal yang berusaha untuk menjadikan Desa Mojomalang sebagai desa mandiri data. Kegiatan ini akan memberikan gambaran kesiapan pada inovasi dari desa dalam proses layanan. Layanan diharapkan akan semakin baik, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pemerintahan secara umum. Adaptasi teknologi dan proses akan menjadi perhatian dari proses penerapan pelayanan ini. Lebih lanjut lagi terkait dengan konsep desa mandiri data, masih perlu banyak proses yang harus dilalui. Pembangunan basis data dan proses pembuatan kebijakan akan menjadi perhatian selanjutnya dari desa Mojomalang.

Ucapan Terima Kasih

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis:

1. Allah SWT atas segala nikmat kesehatan dan karuniaNya
2. Tim Pengabdian dan penyusun artikel
3. Dekan FISIP UNTAG Surabaya beserta jajarannya
4. Perangkat Desa Mojomalang, Kabupaten Tuban yang telah banyak berjasa kepada kami

Daftar Pustaka

Davis, G. B. (1992). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I Pengantar*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.